

SKRIPSI

PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 2 TAHUN 2004



Oleh :

ANA BENA SOFIA
030111075/U

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2005**

**MILIK
PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA**

**PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL
MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 2 TAHUN 2004**


SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

Dosen Pembimbing,

Penyusun,


H. Machsoen Ali, S.H., M.S.
NIP. 130 355 366


Ana Bena Sofia
NIM. 030111075/U

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2005**

**MILIK
PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA**

BAB IV

PENUTUP

1. SIMPULAN

1 Mekanisme penyelesaian perselesihan hubungan industrial pada awalnya diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat oleh para pihak yang berselisih (bipartit), dalam musyawarah tersebut oleh para pihak yang berselisih (bipartit) gagal maka salah satu pihak atau kedua belah pihak mencatatkan perselisihannya pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan setempat.

Perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja atau perselisihan antar serikat pekerja / serikat buruh yang telah dicatat pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dapat diselesaikan melalui konsiliasi atas kesepakatan kedua belah pihak, sedangkan penyelesaian perselisihan melalui abritrase atas kesepakatan kedua belah pihak hanya perselisihan kepentingan dan perselisihan antar serikat pekerja / serikat buruh. Apabila tidak ada kesepakatan kedua belah pihak untuk menyelesaikan perselisihannya melalui

konsiliasi atau abritrase maka sebelum diajukan ke pengadilan hubungan industrial terlebih dahulu melalui mediasi.

Perselisihan hak yang telah dicatat pada intansi yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan tidak dapat diselesaikan melalui konsiliasi atau abritrase namun sebelum diajukan ke pengadilan hubungan industrial terlebih dahulu melalui mediasi.

Dalam hal mediasi atau konsiliasi tidak mencapai kesepakatan yang dituangkan dalam perjanjian bersama maka salah satu pihak dapat megajukan gugatan ke pengadilan hubungan industrial. Penyelesaian hubungan industrial melalui arbitrase dilakukan berdasarkan kesepakatan para pihak dan tidak dapat diajukan gugatan kepengadilan hubungan industrial karena putusan arbitrase bersifat akhir dan tetap.

2.Lembaga yang berwenang menyelesaikan perselisihan hubungan industrial adalah bipartit, mediasi, konsiliasi, arbitrase, dan pengadilan hubungan industrial.

2.SARAN

1.Penyelesaian perselisihan hubungan industrial hendaknya dapat diselesaikan melalui musyawarah mufakat oleh kedua belah pihak tanpa dicampuri oleh pihak manapun. .

2. Penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang melalui pengadilan hubungan industrial hendaknya diselesaikan dengan cepat tepat, adil dan murah yang utama persidangan dengan hakim majelis.

